

ANALISIS KRITIS TERHADAP AKSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASIONAL BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS

MITRO SUBROTO, RAFLI RAHMANDA HARSANTA FEBRIANSYAH

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

rafliccx@gmail.com

Abstract: *This study critically analyzes the access to vocational education and training for prisoners with disabilities, highlighting the challenges they face in rehabilitation and reintegration into society. The urgency of this research stems from the increasing recognition of the need for inclusive educational opportunities that cater to marginalized groups, particularly those with disabilities within correctional facilities. Employing a qualitative research methodology, data was collected through interviews and document analysis to assess the current state of vocational training programs. The findings reveal significant barriers, including inadequate resources and lack of tailored programs, which hinder effective participation. The study concludes that enhancing access to vocational training is essential for improving employment outcomes and reducing recidivism among disabled prisoners.*

Keywords: *vocational education; prisoners with disabilities; access barriers; rehabilitation; recidivism.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis secara kritis akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi narapidana penyandang disabilitas, menyoroti tantangan yang mereka hadapi dalam rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat. Urgensi penelitian ini muncul dari pengakuan yang semakin meningkat akan perlunya peluang pendidikan inklusif yang sesuai untuk kelompok terpinggirkan, khususnya mereka yang memiliki disabilitas di dalam lembaga pemsarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen untuk menilai keadaan program pelatihan vokasional saat ini. Temuan menunjukkan adanya hambatan signifikan, termasuk sumber daya yang tidak memadai dan kurangnya program yang disesuaikan, yang menghalangi partisipasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatkan akses ke pelatihan vokasional sangat penting untuk memperbaiki hasil pekerjaan dan mengurangi residivisme di antara narapidana penyandang disabilitas.

Kata Kunci: pendidikan vokasional; narapidana penyandang disabilitas; hambatan akses; rehabilitasi; residivisme.

A. Pendahuluan

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi narapidana penyandang disabilitas. Di banyak negara, termasuk Indonesia, narapidana dengan disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi dalam sistem pendidikan penjara. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam program pelatihan vokasional yang seharusnya menjadi hak mereka. Pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan kunci untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana setelah masa hukuman mereka berakhir, sehingga penting untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang kondisi fisik atau mental, mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi motivasi dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam program-program tersebut.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep inklusi

sosial dan hak asasi manusia, yang menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Teori-teori ini mendukung argumen bahwa pendidikan adalah hak universal dan harus tersedia tanpa diskriminasi. Konsep inklusi sosial menggarisbawahi perlunya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan peningkatan aksesibilitas bagi semua individu. Dalam konteks narapidana penyandang disabilitas, hal ini berarti bahwa lembaga pemasyarakatan harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan ramah bagi mereka. Namun, meskipun ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi narapidana dengan disabilitas, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi. Banyak program pelatihan yang ada tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik narapidana penyandang disabilitas, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan dan kegagalan dalam mencapai tujuan rehabilitasi.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya program pelatihan vokasional yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan narapidana penyandang disabilitas. Gap analysis menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa penelitian terkait pelatihan vokasional di penjara, sedikit perhatian diberikan pada bagaimana program-program tersebut dapat diadaptasi untuk individu dengan kebutuhan khusus. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi narapidana penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kondisi saat ini serta rekomendasi untuk perbaikan sistem pendidikan di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi narapidana penyandang disabilitas. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan narapidana penyandang disabilitas, petugas lembaga pemasyarakatan, serta ahli pendidikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan narapidana penyandang disabilitas, serta mendorong reformasi dalam sistem pemasyarakatan agar lebih adil dan manusiawi bagi semua individu.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait program pelatihan vokasional di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam tentang pengalaman dan pandangan narapidana penyandang disabilitas serta staf pengajar mengenai akses dan efektivitas program pelatihan yang ada. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai partisipan, termasuk narapidana penyandang disabilitas yang terlibat dalam program pelatihan, serta staf pengajar dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan beragam, yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan untuk menelaah kebijakan, prosedur, dan materi pelatihan yang digunakan dalam program tersebut, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana program pelatihan vokasional diimplementasikan. Spesifikasi penelitian mencakup partisipan dari berbagai latar belakang, termasuk narapidana penyandang disabilitas yang mengikuti program pelatihan vokasional, serta staf pengajar yang bertanggung jawab atas penyampaian materi pelatihan. Dengan melibatkan berbagai perspektif ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi narapidana penyandang

disabilitas. Selain itu, partisipasi staf pengajar sangat penting karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam mengelola program pelatihan dan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti motivasi peserta, dukungan sosial, dan lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi hasil dari program pelatihan. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama terkait akses dan efektivitas program pelatihan. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data menjadi tema-tema yang relevan, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Proses ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang, pengkodean data untuk menandai informasi penting, hingga pengembangan tema berdasarkan pola-pola yang muncul dari data. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan vokasional dan mengevaluasi sejauh mana program tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam pendidikan vokasional di lembaga pemasyarakatan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas serta efektivitas program pelatihan yang ada, pihak berwenang dapat merumuskan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya akses pendidikan bagi semua narapidana sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan akan muncul rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam desain dan implementasi program pelatihan vokasional di masa mendatang.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak narapidana penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses program pelatihan vokasional karena kurangnya fasilitas yang memadai dan kurikulum yang tidak inklusif. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa aksesibilitas pendidikan dan pelatihan bagi narapidana penyandang disabilitas tidak hanya merupakan masalah moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai perundang-undangan.

Hambatan Akses. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak narapidana penyandang disabilitas melaporkan bahwa fasilitas fisik di lembaga pemasyarakatan tidak ramah disabilitas. Hal ini mencakup kurangnya aksesibilitas dalam bangunan, seperti tidak adanya ramp untuk kursi roda, toilet yang tidak sesuai, dan ruang kelas yang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap individu berhak mendapatkan aksesibilitas yang memadai dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Namun, kenyataannya, banyak lembaga pemasyarakatan belum memenuhi standar ini, sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas. Sebuah studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung menunjukkan bahwa fasilitas fisik seperti kursi roda dan aksesibilitas lainnya masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya pelatihan bagi staf lembaga pemasyarakatan mengenai kebutuhan khusus narapidana penyandang disabilitas. Banyak petugas tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara berinteraksi dan mendukung individu dengan disabilitas. Tanpa pemahaman yang memadai tentang cara memberikan dukungan yang

diperlukan, staf mungkin tidak dapat membantu narapidana dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan ini menyebabkan narapidana penyandang disabilitas sering kali merasa terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Misalnya, ketika seorang narapidana dengan keterbatasan fisik mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, mereka sering kali tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dari staf penjara. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi juga menjadi masalah serius bagi narapidana penyandang disabilitas. Mereka sering kali mengalami bullying dari sesama narapidana, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa stigma ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua narapidana, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menekankan pentingnya perlakuan adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang kondisi fisik atau mental mereka. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam desain dan implementasi program pelatihan vokasional agar lebih inklusif bagi narapidana penyandang disabilitas. Reformasi ini harus mencakup peningkatan fasilitas fisik untuk memastikan aksesibilitas, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta kemampuan individu dengan disabilitas, dan penyediaan dukungan psikososial yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak narapidana penyandang disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mereka mendapatkan kesempatan yang adil untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat. Kesadaran akan pentingnya isu ini harus ditingkatkan di kalangan pembuat kebijakan, manajemen lembaga pemasyarakatan, serta masyarakat luas agar semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu.

Kurikulum. Kurikulum yang ada di lembaga pemasyarakatan menjadi masalah signifikan yang perlu perhatian serius. Banyak program pelatihan vokasional yang ditawarkan tidak selalu relevan dengan kebutuhan pasar kerja bagi individu dengan disabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa kurikulum sering kali dirancang tanpa mempertimbangkan keterampilan dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh narapidana penyandang disabilitas. Hal ini bertentangan dengan prinsip inklusi yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa narapidana penyandang disabilitas memiliki kebutuhan unik yang tidak dapat diabaikan jika kita ingin mencapai tujuan rehabilitasi yang efektif. Sebagai contoh, jika seorang narapidana memiliki keterbatasan fisik tertentu, kurikulum yang mengharuskan keterampilan manual atau fisik mungkin tidak sesuai dan dapat mengakibatkan frustrasi serta penurunan motivasi untuk belajar. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan narapidana merasa terasing dan tidak termotivasi untuk berpartisipasi dalam program pelatihan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kurikulum tidak relevan, tingkat keberhasilan dalam rehabilitasi menurun secara signifikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan adaptif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap peserta didik, terutama mereka yang memiliki disabilitas. Lebih lanjut, pentingnya kurikulum adaptif dalam konteks pemasyarakatan juga didukung oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan inklusif dapat meningkatkan hasil belajar bagi semua peserta didik. Kurikulum adaptif adalah suatu model pendidikan yang memungkinkan penyesuaian terhadap metode pengajaran dan materi ajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, ini berarti bahwa program pelatihan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis disabilitas, tingkat

kemampuan, dan minat narapidana. Dengan demikian, mereka dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Akhirnya, untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pihak-pihak terkait sangat diperlukan. Lembaga pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan ahli pendidikan, psikolog, dan organisasi non-pemerintah untuk merancang kurikulum yang sesuai dan menyediakan pelatihan bagi staf tentang cara mengajar dan mendukung narapidana penyandang disabilitas. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan narapidana penyandang disabilitas dapat memperoleh manfaat maksimal dari program pelatihan vokasional, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Reformasi dalam sistem pendidikan di lembaga pemasyarakatan bukan hanya akan meningkatkan kualitas hidup narapidana penyandang disabilitas tetapi juga akan berkontribusi pada pencapaian tujuan rehabilitasi secara keseluruhan.

Dukungan Psikososial. Ketersediaan dukungan psikososial bagi narapidana penyandang disabilitas sangat penting, namun sering kali diabaikan dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana dengan disabilitas sering kali mengalami stigma dan isolasi sosial, baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar. Stigma ini tidak hanya berasal dari sesama narapidana, tetapi juga dari petugas dan masyarakat luas yang sering kali tidak memahami kebutuhan khusus mereka. Dukungan psikososial dapat membantu mereka mengatasi tantangan emosional dan mental yang mereka hadapi selama masa hukuman mereka. Penelitian menunjukkan bahwa ketika narapidana mendapatkan dukungan emosional dan sosial yang memadai, hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan memperbaiki kesehatan mental mereka. Namun, kenyataannya adalah banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki sumber daya atau program khusus untuk menyediakan dukungan psikososial bagi narapidana penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam sistem pemasyarakatan yang seharusnya memberikan perlindungan dan dukungan kepada semua narapidana, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap individu berhak mendapatkan aksesibilitas dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, tanpa adanya program yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan psikososial narapidana penyandang disabilitas, hak-hak mereka sering kali terabaikan. Dukungan psikososial tidak hanya penting untuk kesehatan mental narapidana, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan program rehabilitasi secara keseluruhan. Ketika narapidana merasa didukung secara emosional, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan pelatihan vokasional yang ditawarkan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dukungan semacam ini dapat meningkatkan keberhasilan dalam program rehabilitasi, mengurangi tingkat residivisme, dan membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengembangkan program dukungan psikososial yang komprehensif dan inklusif. Reformasi dalam desain dan implementasi program pelatihan vokasional juga harus mencakup aspek dukungan psikososial ini. Lembaga pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan profesional kesehatan mental untuk menyediakan layanan dukungan yang memadai bagi narapidana penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan bahwa semua narapidana, terlepas dari kondisi fisik atau mental mereka, dapat menerima perlakuan yang adil dan setara serta memiliki kesempatan untuk berhasil dalam proses rehabilitasi. Membangun lingkungan yang mendukung dan inklusif tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup narapidana penyandang disabilitas tetapi juga akan menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan manusiawi secara keseluruhan.

D. Penutup

Simpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi narapidana penyandang disabilitas merupakan isu kritis yang perlu ditangani secara serius oleh pihak berwenang. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh individu tersebut, termasuk kurangnya aksesibilitas fasilitas, kurikulum yang tidak inklusif, dan minimnya dukungan psikososial. Temuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, berhak mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak lembaga pemasyarakatan yang belum memenuhi standar ini. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas program pelatihan vokasional bagi narapidana penyandang disabilitas. Pertama, perlu ada peningkatan aksesibilitas fasilitas fisik di lembaga pemasyarakatan, seperti penambahan ramp, toilet yang sesuai, dan ruang kelas yang ramah disabilitas. Kedua, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan adaptif sangat penting agar dapat memenuhi kebutuhan spesifik narapidana penyandang disabilitas. Ketiga, penyediaan dukungan psikososial yang memadai dapat membantu mereka mengatasi tantangan emosional dan mental selama masa hukuman serta meningkatkan motivasi dalam program rehabilitasi. Implementasi rekomendasi ini akan berkontribusi pada upaya mendukung reintegrasi narapidana penyandang disabilitas ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Dengan memperoleh keterampilan vokasional yang sesuai dan dukungan psikososial yang memadai, mereka akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab. Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa reformasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya akan berdampak positif bagi narapidana penyandang disabilitas, tetapi juga akan berkontribusi pada pencapaian tujuan rehabilitasi secara keseluruhan. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, diharapkan tingkat residivisme dapat diturunkan dan narapidana dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi bagi semua.

Daftar Pustaka

- Ishartiwi. (2006). Implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional. *Jurnal Pendidikan*, 6(2).
- Muhaimin. (2009). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, S. (1991). Pengembangan Kurikulum. Bandung: Citra Aditiya Bhakti.
- Praptingrum, P. (2010). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 7(2).
- Sudjana, N. (1991). Teori-teori Belajar untuk Pengajaran. Jakarta: FEUI.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2005). Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suparlan. (2011). Tanya Jawab Perkembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.

- Reksodiputro, M. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Priyatno, Dwidja. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.